



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH
LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK
PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN
RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

RAHMAH
NIM. 11720725077

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir"*** yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAH

NIM : 11720725077

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Hellen Last Fitriani, S.H, M.H
NIK. 130217 121

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAH**
NIM : 11720725077
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL

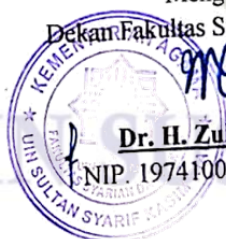
Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si

Penguji I
Lysa Angraini, SH., MH

Penguji II
Asril, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara survey langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, dengan cara melakukan observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, lokasi penelitian berada di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah ada namun belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi malah tidak menerimanya dimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dikatakan bahwa anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) apabila keluarganya tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) hal ini disebabkan beberapa faktor (i) faktor sosialisasi (ii) faktor ketidaktepatan sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (iii) faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Shalawat beriringan salam buat junjungan alam yakni baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam segala tingkah laku yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda M.Jumli (Alm) dan Ibunda Sitti Nurhaya tercinta, serta ke empat kakak penulis Raodah. Ratna Juwita (Alm). Yulianti, S.Pd., M.Si. Nurfadilah, SE, yang telah memberikan seluruh motivasi, dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III. Terima kasih sudah memberikan motivasi dan telah mempermudah proses dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Firdaus, S.H., M.H. Terima kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

sudah memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum. Terima kasih sudah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Ibu Helen Last Fitriani, SH., MH. Terima kasih telah meyempatkan waktunya buat penulis untuk berdiskusi dan memberikann koreksi dalam skripsi ini.

7. Dosen Panasehat Akademik Penulis, Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag. Terima kasih telah memberikan motivasi, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih bapak dan ibu yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Sahabat-sahabat sekaligus teman sekelas penulis Gaby, Tia, dan Bila. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman luar biasa bersama kalian ini akan menjadi moment yang tidak akan terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita tetap berlanjut sampe rambut kita memutih. Dan sukses buat kita semua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman Kelas Ilmu Hukum C, teman Kelas HTN E serta Teman angkatan Ilmu Hukum 2017 yang telah membuat masa-masa kuliah ini menyenangkan.

11. Bapak Kepala Desa, Bapak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan bapak dan ibu masyarakat Desa Pulau Kecil. Terima kasih sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini semoga Allah SWT membalas budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 Juni 2021

Penulis,

RAHMAH

Nim: 1172072507



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	16

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Kecil	18
B. Keadaan Geografis	19
C. Visi dan Misi	24
D. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pulau Kecil	24

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum.....	28
B. Otonomi Daerah	31
C. Pendidikan	35
1. Dasar Hukum Pendidikan	35
2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan	35
3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pendidikan	36
4. Latar Belakang Pendidikan.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kesehatan.....	39
E. Kesejahteraan Sosial.....	41
F. Program Keluarga Harapan (PKH).....	44
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	44
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	45
3. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)	46
4. Besar Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	50
5. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	55
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	13
Tabel II.1	Keadaan Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	20
Tabel II.2	Keadaan Karakteristik Penduduk di Desa Pulau Kecil Berdasarkan Umur Tahun 2021	20
Tabel II.3	Keadaan Penduduk Desa Pulau Kecil Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021	21
Tabel II.4	Tingkat Pendidikan Mayoritas Penduduk di Desa Pulau Kecil Tahun 2021	22
Tabel II.5	Infrastruktur Pendukung Fasilitas Pendidikan di Desa Pulau Kecil Tahun 2021	23
Tabel II.6	Infrastruktur Pendukung Fasilitas Kesehatan di Desa Pulau Kecil Tahun 2021	23
Tabel III.1	Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	51
Tabel IV.1	Tanggapan Masyarakat Mengenai Adanya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

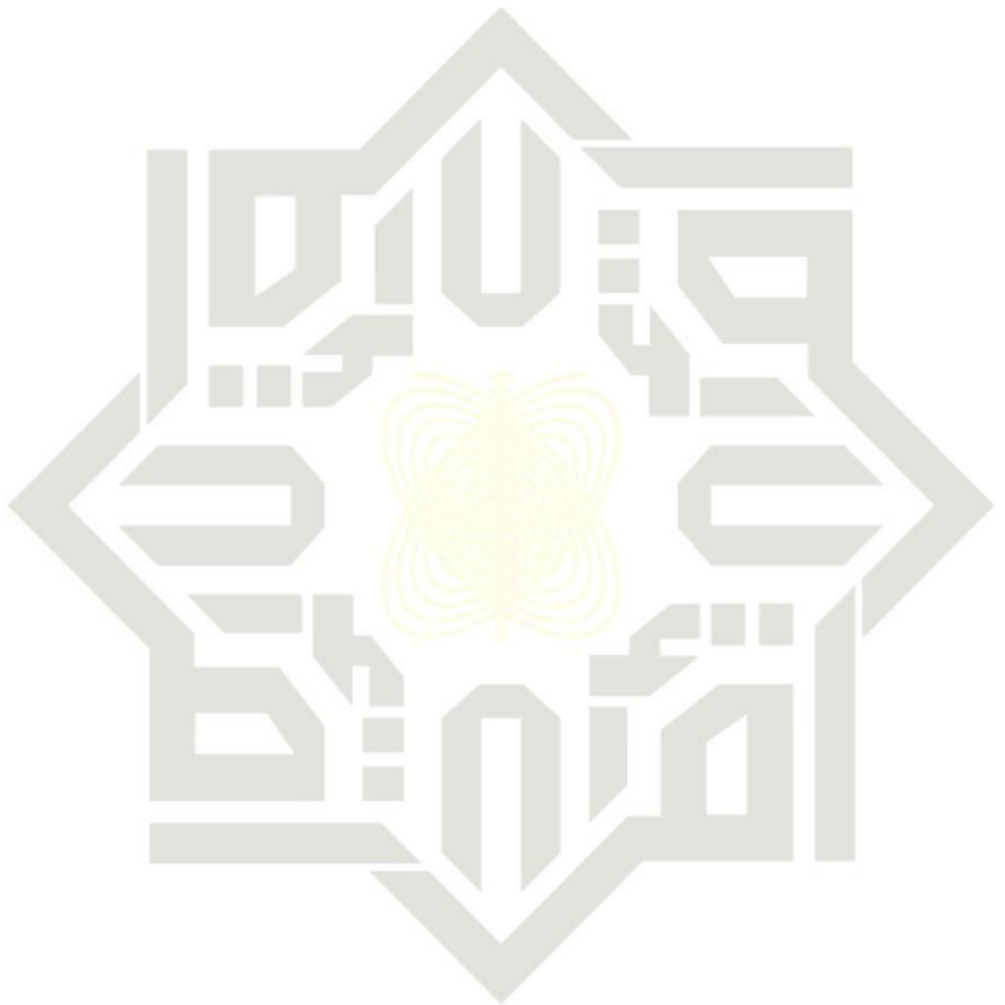
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Perangkat Desa Pulau Kecil.....	26
Gambar II.2	Struktur Kelembagaan BPD.....	27



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Menurut Aristoteles di dalam bukunya *Politica*, Aristoteles merumuskan pandangannya tentang Negara. Menurutnyanya Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah Negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Maksud negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada warga negeranya.¹

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri,

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hanya bersifat pengawasan dan pengendalian saja. Jadi setiap daerah yang menurut Pemerintah Pusat sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah.²

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Kemajuan dan kemandirian adalah hal-hal yang diperlukan bagi ketangguhan dan keuletan bangsa. Kemajuan dan kemandirian ini merupakan modal bangsa untuk tetap unggul dalam percaturan masyarakat internasional.³

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini mengingat peningkatan kualitas manusia yang menjadi subjek pembangunan agar siap berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan juga berfungsi mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi anggota masyarakat yang produktif. Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Upaya memenuhi kebutuhan hidup ini dilakukan dengan upaya memperoleh penghasilan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti melalui bekerja atau berproduksi. Untuk ini perlu keterampilan dan

² J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 32.

³ Nurul Fatma Hasan, *Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan*, Jurnal Studi PGMI, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2017), hal. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan.⁴ Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan oleh sebab itu merupakan tugas negara untuk melaksanakan pembangunannya.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pemahaman tersebut berarti, fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun kutipan preambuli UUD 1945 tersebut sebagai berikut: “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...”

Bicara mengenai kesejahteraan umum tentu tidak lepas dari fenomena kemiskinan yang sudah dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, bahwa dalam konstitusi di atas bangsa ini sudah sangat lama ingin lepas dari cengkeramaan kemiskinan. Telah banyak pula upaya yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Bahkan upaya pemerintah telah banyak didukung dengan aturan tertulis untuk mengatasi kemiskinan, misalnya tentang sistem jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang

⁴ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009), hal. 58-59.

⁵ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Penguasaan Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganganan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengujian dan evaluasi, Karena realita nya kemiskinan masih banyak di jumapi saat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui bantuan sosial pengentasan masyarakat miskin seperti belakunya program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkemes, Raskin, Bsm, Pnpm, hingga Program Keluarga Harapan. Program-program tersebut berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa: “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentangan sosial di sebut sebagai perlindungan sosial”⁶

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan.⁷

Kemiskinan merupakan hal yang sulit didefinisikan dalam definisi tunggal yang bersifat multidimensi. Pakar dari berbagai disiplin ilmu telah banyak mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum terdapat kesepakatan mengenai

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁷ Dedy Utomo, et.al. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Adaministrasi Publik (JAP) Vol 2, No.1, hal. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Konsep kemiskinan yang di sepakati bersama. Beragam perspektif yang digunakan mulai dari perspektif ekonomi, perspektif sosiologi, hingga perspektif moralitas.⁸

Konsep dari kemiskinan secara umum yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁹

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah tengah masyarakat, khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena permasalahan kemiskinan sudah sering dikaji dan dicari solusi untuk mengatasinya namun sampai saat ini belum juga teratasi secara maksimal.¹⁰

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang berbasis rumah tangga, dari sin pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga

⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 209.

⁹ Aain Mahaeni, et. al. *Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1:8-18.

¹⁰ Sutyastie Soemitro Remi, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini program tersebut dikenal sebagai salah satu program yang di akui pemerintah sebagai program unggulan. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Progran Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. Progran Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.¹¹

Progran Keluarga Harapan (PKH) yakni suatu program pemerintah yang di kelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana sudah di ikuti oleh hampir setiap propinsi yang ada Indonesia, tetapi belum menyeluruh. Walaupun demikian, Progran Keluarga Harapan (PKH) tetap diharapkan pemerintah sebagai program yang mempunyai tujuan umum mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus tujuan dari Progran Keluarga Harapan (PKH) itu

¹¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: TNP2K, 2012), hal. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sendiri menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yakni: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan, (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta, (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun(balita), dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin, (4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta Program Keluarga Harapan.¹²

Dari sini dapat digaris bawahi bahwa permasalahan kemiskinan yang ada sudah sejak lama sangat memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari merosotnya mutu generasi di masa depan serta memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun di bagi sebanyak 4 tahap pencairan. Dalam upaya mengurangi adanya kemiskinan juga perlu untuk dilakukan pendekatan kemansusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif, serta penyedia jaminan dan perlindungan sosial. Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam pengentasan rakyat miskin tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dan Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Serta

¹²Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam <https://www.kemsos.go.id/programkeluarga-harapan>, diakses 27 November 2020 15:22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dalam Pasal 34 ayat (3) yakni Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹³

Desa Pulau Kecil Merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Di desa pulau kecil sudah berjalan Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 2017. Di desa Pulau Kecil terdapat 179 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari 1251 Kartu Keluarga (KK) sejak direalisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa ini hingga tahun 2021. RTSM yang mendapatkan PKH sebanyak 128 KSM.

Namun pada kenyataannya masih ada masalah yang terjadi terkait dengan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Pulau Kecil yaitu masih ada anak yang putus sekolah ataupun yang terancam akan putus sekolah karena tidak adanya biaya untuk bersekolah akibat tidak tepatnya sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna namun juga memiliki kelemahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL**

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam Mencegah Anak Putus Sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta, milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang mengkaji tentang Program Keluarga Harapan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum berkaitan terutama yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan program keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan (PKH) oleh Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

- 3) Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan,¹⁵ untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskripsif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008), hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Kecil, Pendamping Sosial Desa Pulau Kecil, Tokoh Masyarakat Desa Pulau Kecil, Masyarakat Desa Pulau Kecil (Dusun), dan Masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Pulau Kecil. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, serta factor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶

Sampel adalah sebagaimana jumlah populasi yang dimiliki sifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁷ Adapun metode yang diambil dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa Pulau Kecil	1	1	100 %
2	Pendamping Sosial PKH Desa Pulau Kecil	1	1	100 %
3	Tokoh Masyarakat Desa Pulau Kecil	3	3	100 %
4	Masyarakat Desa Pulau Kecil (Dusun)	11	7	63 %
5	Masyarakat Penerima	128	8	6,25 %

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 98

¹⁷ Abdurrahman Faithoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH			
Jumlah	144	20	13 %

Sumber: Data Lapangan Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu¹⁸ :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, angket maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

¹⁸ Zainuddin Ali, Op Cit, hal 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Angket

Penulis membuat beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dengan alternatif jawaban yang sudah ditetapkan.

d. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, laporan, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum dari Program Keluarga

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan di Desa Pulau Kecil atau objek yang diteliti dan berupa dokumentasi lainnya.

7. Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) Bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran lokasi penelitian terdiri dari geografis dan demografis, pendidikan, agama, sosial ekonomi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan Negara Hukum, Otonomi Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Teori kesejahteraan sosial dalam masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat uraian bagaimana Bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Kecil

Desa Pulau Kecil merupakan salah satu desa dari 11 (Sebelas) Desa dan 3 (Tiga) kelurahan yang ada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa pulau kecil ini berada di sisi sungai gansal dan juga pada jalan lintas (Jalan Penunjang) antara Kecamatan Reteh dan Kecamatan Keritang. Desa Pulau Kecil merupakan desa yang memiliki 11 (Sebelas) Dusun yaitu Dusun Mekar Jaya, Dusun Suka Karya, Dusun Sidomulyo, Dusun Cahaya Muda, Dusun Tuah Sakti, Dusun Tani Maju, Dusun Sinar Jaya, Dusun Makmur, Dusun Lambang Sari, Dusun Sido Rukun, dan Dusun Sukorejo serta terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Rukun Warga (RW) dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Rukun Tetangga (RT). Awal desa ini terbentuk sekitar tahun 90 (Sembilan puluh) tahun yang lalu. Hal ini bermula karena banyaknya faktor seperti butuhnya pemerataan pembangunan yang mungkin pada saat itu belum dirasakan oleh masyarakat dikarenakan luasnya desa induk Pulau Kecil dan faktor pendukung lain pembentkan desa seperti mempunyai desa untuk memanajemeni pemerintahan sendiri dengan tidak terlepas melihat potensi-potensi alam sekitar yang dapat memenuhi pendapatan desa pada saat itu, maka dari itu tokoh masyarakat memandang pentingnya mempunyai pemerintahann desa sendiri tanpa harus berinduk pada desa lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penamaan Desa Pulau Kecil, bermula dari adanya pulau yang kecil, posisinya berada di tepi sungai gangsal tepatnya berada di muara parit Ibu Desa Pulau Kecil yakni di Dusun Tuah Sakti parit 13. Pulau ini muncul ketika air surut dan apabila air pasang pulau ini juga tenggelam. Desa ini juga dikenal dengan nama lain yakni “Tanjung Patappu” berasal dari bahasa bugis yang artinya pulau atau tanjung yang terendam. Dikatakan tanjung karena pulau ini menjorok keluar arah sungai dan ketika surut seakan-akan bersatu dengan daratan.

Pada tahun 1946 desa pulau kecil disahkan oleh pemerintah, nama pulau kecil diambil dari sebuah nama pulau yang terletak dalam aliran sungai gangsal yang bernama pulau kecil, sejak itulah dinamakan Desa Pulau Kecil.

B. Keadaan Georafis

Wilayah Desa Pulau Kecil merupakan daerah aliran sungai dengan kondisi pasang surut, dengan ketinggian dari dasar sungai mencapai 0-2m diwaktu pasang dan 0-4m naik ketinggian ketika pasang besar. Dan bahkan pada wilayah pinggiran aliran sungai tergenang air mencapai 100 Meter kedaratan. Desa Pulau Kecil merupakan daerah tropis. Pergantian musim hujan kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya bagi tanaman masyarakat desa pulau kecil. Desa pulau kecil mayoritas penduduknya bekerja pada sektor perkebunan pinang, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, dan pertanian padi.

1. Keadaan Karasteristik Penduduk

Jumlah pendudukn Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tahun pada tahun 2021 sebesar 5.618 jiwa yang terbagi

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

daerah 1.251 KK dengan kepadatan penduduk 102 jiwa per km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 3.396 orang dan perempuan 2.222 orang. Berikut ini akan diuraikan keadaan karakteristik penduduk menurut jenis kelamin dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel II. 1 : Keadaan Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	3.396
2	Perempuan	2.222
	Jumlah	5.618

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021

Tabel II. 2 : Keadaan Karakteristik Penduduk di Desa Pulau Kecil Berdasarkan Umur Tahun 2021

No	Umur	Jumlah (Orang)
1	0-3 tahun	243
2	03-05 tahun	210
	05-06 tahun	212
	06-12 tahun	288
	12-15 tahun	220
	15-18 tahun	448
	18-60 tahun	3.997
	Jumlah	5.618

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel II. 3 : Keadaan Penduduk Desa Pulau Kecil Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan Masyarakat Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang tertinggi bekerja sebagai Petani berjumlah 691 jiwa dan paling sedikit bekerja Bidan/Perawat dan Polri.

3. Tingkat Pendidikan Mayoritas Penduduk

Pendidikan dalam masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital dan berarti, karena pendidikan suatu masyarakat ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah.

Adapun tingkat pendidikan mayoritas penduduk di Desa Pulau Kecil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 4 : Tingkat Pendidikan Mayoritas Penduduk di Desa Pulau Kecil Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	PAUD/TK	79
2	TAMAT SD	214
3	MDA	83
4	DTA	79
5	SMP	195
6	SMA	128
7	S1/DIPLOMA/D3	49
Jumlah		827

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Infrastruktur Pendukung Fasilitas Pendidikan

Tabel II. 5 : Infrastruktur Pendukung Fasilitas Pendidikan di Desa Pulau Kecil Tahun 2021

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	3
2	SD/MI	7
3	SMP/MTS	4
4	SMA/MA	1

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021

Masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan rusak, sehingga mengganggu atau menghambat proses belajar mengajar.

2. Infrastruktur Pendukung Fasilitas Kesehatan

Tabel II. 6 : Infrastruktur Pendukung Fasilitas Kesehatan di Desa Pulau Kecil Tahun 2021

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	POSYANDU	4
2	PUSTU	1
3	PUSKESMAS	-
4	RSUD	-

Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecil Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan rusak, sehingga mengganggu atau menghambat proses pelayanan kesehatan.

C Visi dan Misi

a) Visi

Desa pulau kecil berkualitas di segala bidang sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman dalam rangka otonomi menuju desa mandiri.

b) Misi

- a. Disiplin
- b. Pemerataan pembangunan di segala bidang (ipoleksosbuhankam) dengan perinsip perioritas
- c. Meningkatkan kualitas hidup, ketertiban serta kepribadian yang bermoral terutama bagi lembaga-lembaga serta perangkat desa
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat serta keprofesionalan untuk menuju standar nasional/internasional
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi.

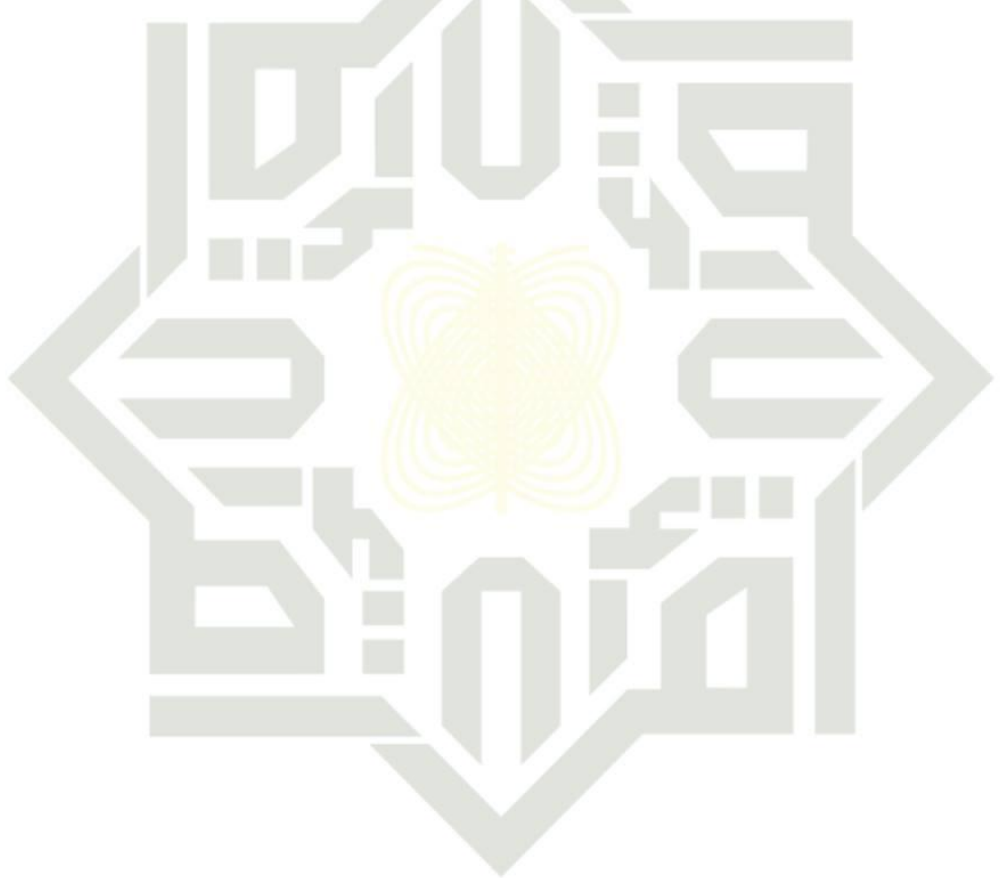
D. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pulau Kecil

PKH yakni suatu program pemerintah yang di kelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana sudah di ikuti oleh hampir setiap propinsi yang ada Indonesia, tetapi belum menyeluruh. Program Keluarga Harapan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

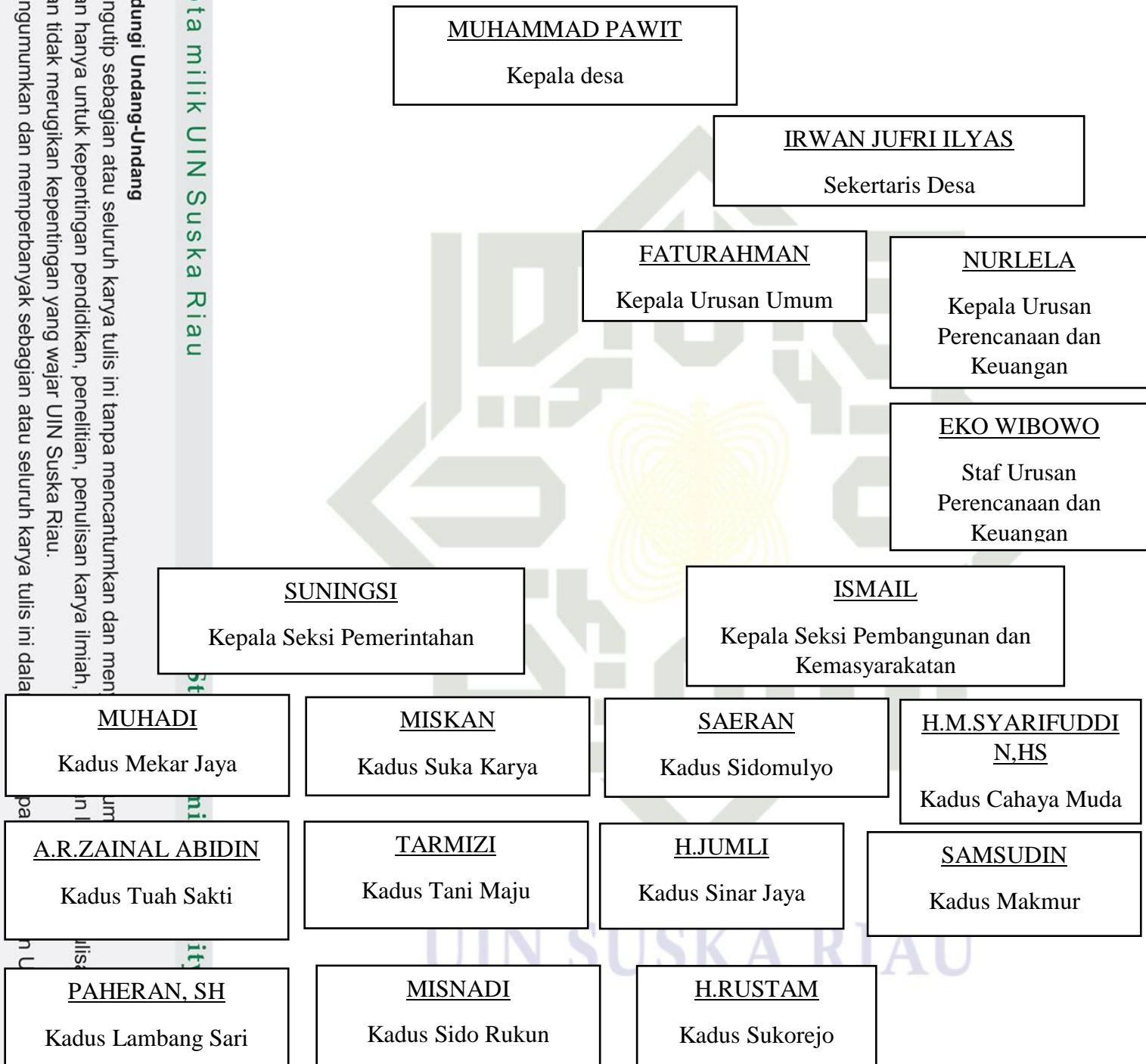
(PKH) sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Namun untuk di desa pulau kecil kecamatan reteh kanupaten Indragiri hilir bantaun Program Keluarga Harapan (PKH) baru terlaksana sekitar tahun 2017. Jumlah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 128 orang. Program Keluarga Harapan (PKH) di desa pulau kecil kecamatan reteh kanupaten Indragiri hilir ini memiliki 1 (satu) pendamping.



UIN SUSKA RIAU

Gambar II. 1

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA PULAU KECIL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II. 2**STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²⁰ Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usai ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.²¹ Kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.²²

Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.²³ Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.²⁴ Pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI

²⁰ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 1.

²¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24.

²² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 1.

²³ S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, hal. 9.

²⁴ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal. 11.



paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negar hukum.²⁵

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁶ Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁷

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.²⁸ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁹

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di

²⁵ Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 147.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

²⁷ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hal. 153.

²⁸ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 166.

²⁹ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hal. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³⁰

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*.³¹ Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,³² konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif³³ (3) Negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*,³⁴ konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.³⁵ Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.³⁶ (4) Konsep *socialist legality*,³⁷ *Social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.³⁸ (5) Konsep negara hukum

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 2.

³¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 1.

³² Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 72.

³³ Ridwan HR, *Op.Cit*, 1.

³⁴ Philipus M. Hardjon, *Op.Cit*, hal. 72.

³⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hal. 74.

³⁶ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 2.

³⁷ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hal. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pancasila.³⁸

Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.³⁹

Perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechsstaat*)⁴⁰

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.⁴¹ Menurut Sarundajang otonomi daerah adalah⁴² Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di

³⁸ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 2.

³⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hal. 20.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal 61-62

⁴¹ Juniorso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012), hal.109.

⁴² Ibid, hal. 110.



luar batas-batas wilayah daerahnya, Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya, dan Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan public. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁴³

Otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara.

Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di daerah dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.

2. Dasar Penerapan Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam ketentuan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam

⁴³ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan Negara yang mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Selain itu, Pasal 1 ayat (5) UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.⁴⁴

Mencermati pengertian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan Negara yang mempunyai aneka ragam suku

⁴⁴ UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangsa dan potensi daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah

Kelebihan

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.
- c. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah.
- d. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk diadakan.
- e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.
- f. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurangan

- a. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.
- b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.⁴⁵

C. Pendidikan

1. Dasar Hukum Pendidikan

Dasar hukum pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang

⁴⁵ https://folkscore.blogspot.com/_kelebihan-dan-kekurangan-otonomi-daerah, diakses 21 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dan diakui oleh masyarakat.⁴⁶

Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁷

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

a. Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Tap.MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertinggi semangat 15 kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pebangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:

- a) Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila.
- b) Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya.

⁴⁶ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁷ Sumitro, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1998), hal. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran.
- d) Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang.Studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

b. Fungsi Pendidikan

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pendidikan

Negara bertanggung jawab dan wajib menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 31 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “(1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.* (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.* (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.* (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.* (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan*



peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.⁴⁸

4. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Disamping itu, latar belakang pendidikan dengan prestasi akademis yang diraihny dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Prestasi akademik yang telah dicapai oleh tenaga kerja selama mengikuti jenjang pendidikan harus mendapatkan pertimbangan dalam penempatan, dimana tenaga kerja seharusnya melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:⁴⁹

1) Pendidikan dasar

Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan

⁴⁸ Undang –Undang Dasar 1945

⁴⁹ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan bekal dasar bagaimana kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.

2) Pendidikan menengah

Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan kebawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar dan dalam hubungan keatas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

3) Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

D Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial guna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis dalam keadaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jasmani, ruhani, dan sosial.⁵⁰

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1992 yang di kutip oleh Wahid dalam bukunya bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan (jasmani), jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sehat fisik adalah suatu keadaan di mana bentuk fisik dan fungsinya tidak mengalami gangguan, sehingga memungkinkan berkembangnya mental atau psikologis dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal.⁵¹

Menurut WHO yang di kutip oleh Wahid dalam bukunya bahwa yang dikatakan sehat adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit dan/atau kelemahan. Dalam konsep sehat menurut WHO yang dikutip oleh Wahid dalam bukunya tersebut, diharapkan adanya keseimbangan yang serasi dalam interaksi antara manusia, makhluk hidup lain, dan dengan lingkungannya.⁵²

Sebagai konsekuensi dari konsep WHO tersebut, maka yang dikatakan manusia sehat adalah:

1. Tidak sakit
2. Tidak cacat
3. Tidak lemah

⁵⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 4-5.

⁵¹ Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hal. 17.

⁵² Ibid, hal. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahagia secara rohani
5. Sejahtera secara sosial
6. Sehat secara jasmani.

Pada konsep kesehatan menurut H.L. Blum yang di kutip oleh Suyono dalam bukunya, ada 4 faktor, yaitu faktor keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Keempat faktor tersebut berpengaruh positif dan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang status kesehatan akan tercapai optimal apabila keempat faktor tersebut positif mempengaruhi secara optimal. Apabila salah satu faktor optimal, status kesehatan akan bergeser ke arah di bawah optimal.⁵³

E. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.⁵⁴ Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

⁵³ Suyono, Budiman, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, 2010), hal. 2.

⁵⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial>. Di akses pada 30 Mei 2021 Pukul 20:33 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁵

Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.⁵⁶

2. Indikator Kesejahteraan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) memberikan beberapa indikatornya sebagai acuan dalam penentuan keluarga sejahtera yang terdiri dari 21 indikator.

1. Makan dua kali sehari atau lebih.
2. Memiliki pakaian yang berbeda.
3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi.
5. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah.
6. Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.
8. Paling kurang sekali seminggu makan Psikologi daging/ikan/telur.
9. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

⁵⁵ UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁵⁶ Intan Indra Nataila, *Kajian Tingkat Kesejahteraan*, (FKIP UMP, 2016), hal. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

10. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah.
11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.
12. Ada anggota keluarga yang bekerja atau memperoleh penghasilan.
13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
14. PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.
15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. KS III Kebutuhan Pengembangan.
16. Sebagian penghasilan ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
17. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi.
18. Mengikuti kegiatan masyarakat.
19. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah.
20. Memberikan sumbangan materiil secara teratur. KS III PLUS Kebutuhan.
21. Aktif sebagai pengurus organisasi Aktualisasi Diri kemasyarakatan.

Dimana tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN dibagi menjadi 5 tahapan diantaranya adalah:⁵⁷

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

⁵⁷ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>. Di akses pada 30 Mei 2021 Pukul 21:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (pshychological needs) keluarga.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator pengembangan (developmental needs) dari keluarga.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

f. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

F. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁵⁸

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang berbasis rumah tangga, dari sini pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini program tersebut dikenal sebagai salah satu program yang di akui pemerintah sebagai program unggulan. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.⁵⁹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung

⁵⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

⁵⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Op.Cit*, hal. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan PKH meliputi 5 hal sebagaimana sudah tertulis dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
 - b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
 - c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
 - d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
 - e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁶⁰
3. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)
- Sasaran Program Keluarga Harapan Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) membahas kriteria penerima bantuan PKH, yaitu:

Kriteria komponen kesehatan

- a. Ibu hamil / menyusui; dan

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam tahun)

Kriteria komponen pendidikan

- a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat; dan
- c. Anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.⁶¹

4. Hak Dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

Anak Usia 0-6 Tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (day care)

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care).

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota.⁶²

⁶² Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Op.Cit*, hal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

4. Besar Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1 : Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

N	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 3.000.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp.3.000.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 2.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakuan 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(empat) kali tahapan dalam 1 (satu) tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni– September–November.⁶³

5. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping ialah mendampingi langsung penerima manfaat PKH. Seorang pendamping dibutuhkan perannya karena kebanyakan RTSM tidak memiliki kekuatan apapun baik itu suara atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesungguhnya, untuk itulah mereka membutuhkan pendamping yang bisa mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Seorang pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan di lapangan, yaitu:

a. Tugas persiapan program

Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH.
- 2) Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.

⁶³ Irsal, (Pendamping PKH), Wawancara, tanggal 16 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

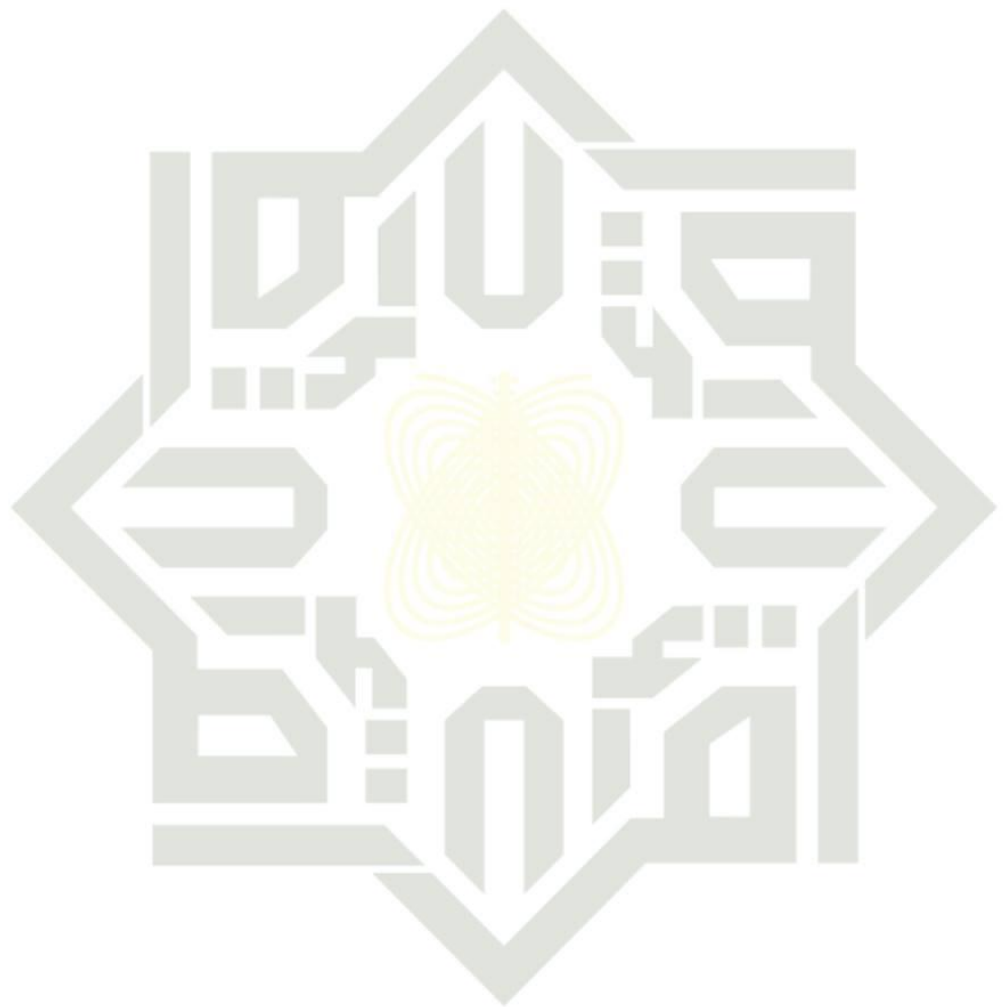
- 3) Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk memudahkan tugas pendamping.
 - 4) Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu0ibu peserta PKH
 - 5) Membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota.
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke puskesmas dan pendaftaran ke sekolah.
- b. Tugas rutin
- 1) Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten / Kota.
 - 2) Menerima pengaduan dari ketua kelompok atau peserta PKH serta di bawah koordinasi UPPKH Kabupaten / Kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
 - 3) Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen.
 - 4) Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap 6 bulan untuk resosialisasi (program dan kemajuan atau perubahan dalam program).
 - 5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - 6) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan pertemuan bulanan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan terkait.
- 8) Melakukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.⁶⁴



UIN SUSKA RIAU

⁶⁴ Buku Saku Pendamping Program Keluarga Harapan, hal. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah ada namun belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi malah tidak menerimanya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dimana dalam Peraturan tersebut dikatakan bahwa anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) apabila keluarganya tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya:

a. Faktor Sosialisasi

Salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana hal ini disebabkan karena tidak meratanya sosialisasi bagi masyarakat yang ada di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh yang dilakukan dari pihak desa.

b. Faktor ketidakepatan sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adanya masyarakat yang masih belum menerima bantuan PKH padahal mereka termasuk kriteria yang berhak mendapatkan bantuan yang dikarenakan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, yang disebabkan kurangnya survey yang dilakukan di lapangan.

c. Faktor Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Banyaknya masyarakat yang masih awam atau tidak peduli tentang adanya bantuan yang diberikan oleh desa salah satunya bantuan Program



Keluarga Harapan (PKH), hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak peduli dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi dan sosialisasi dari desa yang menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan bantuan Progran Keluarga Harapan (PKH) agar lebih terarah dan dapat memberi kesadaran pentingnya pendidikan.
2. Bagi petugas PKH atau pendamping PKH harus lebih mengarahkan kepada penerima PKH agar kedepannya lebih memfokuskan pada proses penyadaran akan bantuan PKH.
3. Dalam menentukan penerima bantuan Progran Keluarga Harapan (PKH) di harapkan menggunakan data yang valid agar lebih tepat sasaran sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pemberian bantuan PKH terutama dibidang pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Lincoln. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budiono, Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- El. Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faithoni, Abdurahman. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul Huda. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal Mubarak, Wahid dan Nurul Chayatin. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- M. Hardjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardja, Tirta dan La Sulo. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: DEPDIKBUD.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Suyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Suyono, Budiman. 2010. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- W. Al-Hafidz, Ahsin. 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aan Mahaeni, et.al. Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X, Jakarta, 2010
- Dedy Utomo, et.al. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, Jurnal Adaministrasi Publik (JAP) Vol 2, Bandung, 2017
- Nurul Fatma Hasan, Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan, Jurnal Studi PGMI, Vol. 4, Jakarta, 2014
- S. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, hal. 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

Ti Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: TNP2K, 2012

C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

D. Website

<https://www.kemsos.go.id/programkeluarga-harapan>, diakses 27 November 2020 15:22 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 20:53 WIB.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 21:20 WIB.

<https://folkscore.blogspot.com>, kelebihan-dan-kekurangan-otonomi-daerah, diakses 21 Juni 2021 Pukul 14:59 WIB.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



**Wawancara Bersama Kepala Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten
Indragiri Hilir**



**Wawancara Bersama Pendamping Sosial PKH Desa Pulau Kecil Kecamatan
Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Toko Masyarakat Desa Pulau Kecil



Pembagian Angket Kepada Masyarakat Desa Pulau Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Penerima Bantuan PKH Desa Pulau Kecil



Wawancara Bersama Salah Satu Keluarga Kurang Mampu Yang Tidak Dapat Bantuan PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soeharto No. 105 KM 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1304 Telp / Fax. 0761-562582
Web: www.iain-suska.ac.id Email: iain@suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/2877/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAH
NIM : 11720725077
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul :PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH
LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH
MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA
PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. H. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/IVON IZIN-RISSET/39576
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.BPP.00.9/2877/2021 Tanggal 10 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RAHMAH |
| 2. NIM / KTP | : 11720725077 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Maret 2021



Dibastangi Secara Elektronik Melalui
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Temblahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University

of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/III

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39576 Tanggal 12 Maret 2021, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: RAHMAH
NIM	: 11720725077
Program studi/Jenjang	: Ilmu Hukum / S1
Alamat	: Jl. Penunjang Desa Sinar Jaya
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2021 s/d 22 Juli 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 22 April 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE

Penata TK. I

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
DESA PULAUKECIL
Jalan Penunjang Desa Pulaukecil Kode POS 29273

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 18 /SI-P. PLK/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD PAWIT
Jabatan : Kepala Desa Pulau Kecil
Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAH
Nim : 11720725077
Fakultas/Jurusan : Sayriah/Illmu Hukum S1
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif Riau

Nama yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.**” Sejak bulan maret sampai dengan April 2021.

Demikian Surat keterangan Penelitian ini di buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulauecil, 19 April 2021
Kepala Desa Pulau kecil


MUHAMMAD PAWIT

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAHMAH
NIM : 11720725077
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pembimbing: Helen Last Fitriani, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juli 2021
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAH**
 NIM : 11720725077
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si

Penguji I
Lysa Angraini, SH., MH

Penguji II
Asril, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



RAHMAH, lahir di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 07 Januari 1999. Anak kelima dari 5 (lima) bersaudara, lahir dari pasangan bapak M. Jumli dan ibu Sitti Nurhaya. Pada tahun 2005, Penulis

mulai mengecap pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 013 Pulau Kecil, lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Reteh Pulau Kijang, lulus pada tahun 2014, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Reteh Pulau Kijang, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu dan doa kedua orang tua, Penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu hukum. Pada tahun 2019 Penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul skripsi “**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**”.

UIN SUSKA RIAU